

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gaya kepemimpinan seorang pemimpin yang turun langsung ke tengah-tengah masyarakat bukanlah hal baru bagi masyarakat Minangkabau. Kota Padang pernah memilikinya, seorang walikota bernama Syahrul Ujud di era 80 sampai 90-an.¹ Syahrul Ujud adalah Walikota Padang yang memegang dua kali masa jabatan yaitu tahun 1983-1993. Di masa kepemimpinannya, Syahrul Ujud sering melakukan turba (turun ke bawah) ke lapangan mengunjungi masyarakat ataupun meninjau proyek-proyek pembangunan seperti peninjauan proyek pembangunan Jalan Bypass.² Turun langsung ke lapangan dilakukan Syahrul Ujud juga untuk sekedar memantau kebersihan kota. Jika melihat sampah, Syahrul Ujud langsung menghubungi camat daerah setempat menggunakan radio orarinya agar segera membereskan sampah yang berserakkan tersebut. Pasar juga termasuk sasaran Syahrul Ujud yang menjadi agenda setelah shubuh.³ Setiap pedagang yang ditemui disalaminya hanya untuk sekedar menanyakan bagaimana perkembangan dagangan dan halangan berdagang di pasar.

Gaya kepemimpinan walikota Syahrul Ujud mengantarkan Kota Padang ke masa-masa kejayaan di bidang pemerintahan dan penataan kota. Hal ini dapat

¹ Miko Kamal, *Catatan Tata Kelola Kota*, (Padang : Erka, 2017) hlm. 28.

² *Semangat*, 07 Desember 1991

³ Miko Kamal, *Op.Cit.* hlm. 29.

disaksikan dengan berbagai prestasi dan penghargaan atas tercapainya keberhasilan pembangunan dan penataan kota di antaranya tahun 1986 Kota Padang untuk pertama kalinya menerima Piala Adipura sebagai juara kategori kota bersih dan tahun 1991 Kota Padang menerima Piala Adipura Kencana karena berhasil mendapat Piala Adipura lima kali berturut-turut.⁴ Kota Padang juga pernah meraih Piala Wahana Tata Nugraha tahun 1992 sebagai lambang kota tertib lalu lintas di Indonesia.⁵ Padahal sebelumnya Kota Padang ditimpa banyak permasalahan seperti sistem pemerintahan yang amburadul hingga permasalahan lingkungan kota yang kumuh dan memprihatinkan. Hingga pertengahan tahun 70-an Kota Padang tumbuh dan berkembang dengan apa adanya. Tidak jelasnya perencanaan pembangunan kota yang memadai dalam penataan kawasan yang dapat dijadikan sebagai pusat kota, kawasan pemukiman, kawasan industri maupun mengenai sarana dan prasarana transportasi.⁶ Terhitung semenjak kepemimpinan Hasan Basri Durin mulai dilakukannya penataan dan pengembangan kota dan berlanjut hingga kepemimpinan Syahrul Ujud.

Syahrul Ujud memiliki latar belakang sebagai seorang jaksa. Ia menamatkan pendidikan Sekolah Hakim Djaksa di Medan dan kemudian ditugaskan menjadi jaksa di Talu Kabupaten Pasaman. Tahun 1970, Syahrul Ujud melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Unand.⁷ Ia juga dikaryakan di

⁴ Walneg S. Jas Dan Windo Wibowo, *Padang Di Persimpangan Jalan ?*, (Jakarta : PT. Visi Media Nusantara, 2012), hlm. 65.

⁵ *Haluan*, 19 September 1992

⁶ Hasril Chaniago, dan Eko Yanche Edrie (eds), *Hasan Basri Durin, Sebuah Otobiografi*. (Padang : Yayasan Citra Budaya Indonesia. 2010) hlm. 146.

⁷ Ed Zoelverdi, dkk. *Siapa Mengapa Sejumlah Orang Minang*. (Jakarta : BK3AM. 1995), hlm. 462

kantor gubernur sebagai Kepala Bagian Pengawasan Panitia Pemilihan Daerah (PPD) Tingkat I Sumatera Barat. Disinilah awal pertemuannya dengan pamong senior, Hasan Basri Durin yang juga membelokkan karirnya dari jaksa menjadi pamong. Walaupun berlatar belakang sebagai seorang jaksa, ternyata tidak menjadi persoalan bagi Syahrul Ujud dalam mengelola dan mengurus pemerintahan. Syahrul Ujud bahkan diangkat menjadi kepala kantor sosial politik Kota Padang hingga menjadi Walikota Padang melanjutkan kepemimpinan Hasan Basri Durin.

Selama menjabat sebagai Walikota Padang, berbagai permasalahan harus dihadapi dan diselesaikan Syahrul Ujud dalam mengelola kota. Selain permasalahan yang berhubungan pengadaan sarana dan prasarana kota, permasalahan yang sangat mendesak ialah masalah perencanaan tata ruang kota. Perubahan tapal batas Kota Padang yang dikukuhkan oleh Peraturan Pemerintah Daerah nomor 17 tahun 1980, menjadikan luas wilayah Kota Padang bertambah 21 kali lipat dibandingkan luas wilayah sebelumnya.⁸ Perluasan wilayah menyebabkan bertambahnya daerah-daerah dengan status terisolir di Kota Padang dan tidak meratanya kepadatan penduduk.. Disamping itu, letak geografis Kota Padang di bagian timur yang merupakan kawasan Bukit Barisan, membuat Kota Padang menjadi rawan terhadap bahaya banjir. Dataran tinggi tersebut mengalirkan sungai-sungai yang setiap tahunnya membuat debit air yang cukup besar terutama pada musim penghujan.

⁸ Hasril Chaniago, dan Eko Yanche Edrie (eds), *Op.Cit.* hlm. 185.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagai kepala daerah untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada, Syahrul Ujud menggunakan pendekatan khusus dan gaya kepemimpinan yang berbeda. Sejak awal ia menyadari bahwa sebagian besar warga Kota Padang berasal dari etnis Minangkabau yang sangat menghargai pemuka adat, alim ulama dan cendikiawan sebagai tokoh terkemuka di kalangan masyarakat. Ketiga tokoh tersebut dikenal dengan *Tungku Tigo Sajarangan* dan *Tali Tigo Sapilin* dengan sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi panutan masyarakat Minang. Berdasarkan hal tersebut Syahrul Ujud menerapkan sifat-sifat kepemimpinan dari ketiga pilar-pilar kepemimpinan masyarakat Minang. Pada masyarakat Minangkabau, seorang pemimpin seperti pepatah Minang *didahulukan selangkah ditinggikan seranting*.

Gaya kepemimpinan Syahrul Ujud dalam menjalankan pemerintahan Kota Padang menarik untuk diteliti. Dengan gaya kepemimpinannya yang suka turba dan menyapa warga sangat sulit ditemukan di periode pemerintahannya masa orde baru dengan sistem otoriter. Gaya kepemimpinan egaliter yang diterapkan Syahrul Ujud merupakan filosofi kepemimpinan di Minangkabau. Kesuksesan Kota Padang dalam bidang pembangunan dan penataan salah satunya pengaruh gaya kepemimpinannya terhadap pandangan masyarakat hingga masyarakat Kota Padang bergotong royong turut serta membantu dalam pembenahan kota kearah yang lebih baik.

Hal yang mendasari penulisan sejarah tentang kepemimpinan Syahrul Ujud ialah : *Pertama*, belum ada buku-buku atau karya ilmiah yang secara khusus dan mendalam membahas tentang kepemimpinan Walikota Syahrul Ujud. *Kedua*,

Walikota Syahrul Ujud dengan gaya kepemimpinan yang populis dan egaliter di zaman Orde Baru yang membawa berbagai kesuksesan pembangunan dan penataan Kota Padang seperti Kota Padang hampir setiap tahun meraih Piala Adipura dan Piala Wahana Tata Nugraha, dan terealisasinya berbagai proyek pembangunan seperti proyek pengendalian banjir dan proyek pembangunan Jalan Bypass. Berdasarkan konteks tersebut penulisan skripsi ini diajukan dengan mengambil judul **“Kepemimpinan Walikota Syahrul Ujud di Kota Padang Tahun 1983-1993”**

B. Perumusan dan Batasan Masalah

Fokus kajian ini adalah kepemimpinan Syahrul Ujud selama menjabat sebagai Walikota Padang tahun 1983-1993. Kota Padang pada masa kepemimpinan Syahrul Ujud begitu berkibar karena aneka prestasi dan penghargaan baik di bidang pembangunan maupun penataan kota. Keberhasilan pembangunan dan penataan kota tidak terlepas dari pola dan gaya kepemimpinan yang diterapkan Syahrul Ujud selama memimpin Kota Padang. Syahrul Ujud disebut-sebut sebagai walikota yang merakyat era 80an dengan gaya kepemimpinan yang sering turba ke tengah-tengah masyarakat. Jika dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin saat itu yang merupakan era Orde Baru, Syahrul Ujud keluar jalur dengan menampilkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Syahrul Ujud muncul dengan menggunakan pendekatan dan gaya kepemimpinan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebudayaan masyarakat Kota Padang yaitu kebudayaan Minangkabau.

Penelitian tentang Kepemimpinan Walikota Syahrul Ujud di Kota Padang Tahun 1983-1993 ini mengambil batasan spasial di Kota Padang yang merupakan wilayah administratif pemerintahan Walikota Syahrul Ujud. Secara administratif Kota Padang memiliki luas 694,96 km² yang terdiri dari 11 kecamatan dan 193 kelurahan. Batasan spasial ini digunakan untuk mengarahkan topik kajian agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai ruang lingkup penelitian.

Batasan temporal penelitian ini adalah tahun 1983 hingga tahun 1993. Tahun 1983 dipilih karena pada tahun ini Syahrul Ujud mulai menjabat sebagai Walikota Padang periode I untuk masa jabatan 5 tahun hingga tahun 1988. Pada pemilihan walikota Padang tahun 1988 berikutnya, Syahrul Ujud kembali terpilih menjadi walikota Padang yang merupakan periode II masa jabatannya untuk jabatan 5 tahun hingga tahun 1993. Sejak berlakunya Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang menjelaskan bahwa kepala daerah diangkat untuk masa jabatan 5 tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya, sebagian besar kepala daerah dipilih dan diangkat untuk dua kali masa jabatan. Terpilihnya kembali Syahrul Ujud sebagai Walikota Padang juga tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan dan gaya kepemimpinan Syahrul Ujud sebagai Walikota Padang pada periode I.

Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan, maka perlu dirumuskan beberapa pertanyaan guna menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini, di antaranya :

1. Bagaimana latar belakang kehidupan Syahrul Ujud yang telah membentuk karakter dan gaya kepemimpinannya ketika menjabat sebagai Walikota Padang ?
2. Bagaimana bentuk gambaran umum Kota Padang tahun 1983 pada masa awal kepemimpinan Syahrul Ujud dan apa saja bentuk-bentuk kebijakan yang diterapkan oleh Syahrul Ujud dalam rangka pembangunan Kota Padang ?
3. Apa pola dan gaya kepemimpinan Syahrul Ujud dalam memimpin Kota Padang dan kenapa Syahrul Ujud menggunakan gaya kepemimpinan tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menganalisis pola kepemimpinan Syahrul Ujud dalam membangun Kota Padang. Maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan latar belakang kehidupan Syahrul Ujud yang membentuk karakter kepemimpinannya.
2. Memaparkan gambaran umum Kota Padang tahun 1983 pada masa awal kepemimpinan Syahrul Ujud dan menjelaskan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Syahrul Ujud dalam rangka pembangunan Kota Padang.
3. Menganalisis pendekatan kepemimpinan Syahrul Ujud dalam memimpin Kota Padang.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperoleh penjelasan

serta gambaran mengenai gaya kepemimpinan walikota Syahrul Ujud di Kota Padang sehingga dapat menjadi suatu karya atau tulisan yang memberikan manfaat bagi pembaca. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai salah satu bagian dari penulisan sejarah yang dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi generasi yang akan datang dalam meneliti tema pembahasan yang serupa. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi koleksi kepustakaan dan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak.

D. Tinjauan Pustaka

Penulisan dan kajian tentang Syahrul Ujud di Kota Padang sebelumnya sudah dilakukan oleh beberapa penulis. Buku yang ditulis oleh Mafri Amir dengan judul “Mengemas Kisah di Jalur Emas : 50 Tahun Pernikahan Syahrul Ujud dengan Rosmawar”, membahas tentang perjalanan hidup dan testimoni berbagai pihak terhadap Syahrul Ujud bersama sang istri Rosmawar. Buku ini terdiri dari beberapa bagian diantaranya bagian pertama menceritakan tentang perjalanan hidup Syahrul Ujud ketika menjadi jaksa di Talu hingga menjadi Staf Khusus Wakil Presiden RI, bagian kedua menceritakan kisah kasih Syahrul Ujud ketika menjadi jaksa dengan Rosmawar seorang guru SGA, bagian ketiga merupakan testimoni dari berbagai tokoh seperti Azwar Anas, Basril Djabar, Shofwan Karim dan lain-lain, bagian keempat adalah testimoni dari keluarga, dan bagian kelima berisi testimoni dari media sosial.⁹

Buku yang ditulis oleh Ed Zoelverdi dengan judul “Siapa dan Mengapa

⁹ Mafri Amir, *Mengemas Kisah Di Jalur Emas*,(Jakarta, 2017)

Sejumlah Orang Minang” memaparkan biografi singkat sejumlah tokoh-tokoh Minang salah satunya biografi Syahrul Ujud. Buku ini menjelaskan riwayat hidup singkat Syahrul Ujud mulai dari latar belakang kehidupan keluarga, pendidikan, hingga menjadi Walikota Padang dua periode.¹⁰

Buku yang ditulis oleh Hasril Chaniago dan Eko Yanche Edrie yang berjudul “Hasan Basri Durin, Sebuah Otobiografi”, membahas tentang riwayat hidup Hasan Basri Durin dengan corak penulisan yang dikisahkan sendiri oleh tokoh. Hasan Basri Durin adalah seorang pamong yang pernah memimpin Kota Padang dua periode tahun 1971-1983 dan memimpin Sumatera Barat dua periode tahun 1987-1997. Buku ini juga mengisahkan tentang Syahrul Ujud yang melanjutkan kepemimpinan Hasan Basri Durin sebagai Walikota Padang.¹¹

Buku karangan Freek Colombijn yang berjudul “Paco-paco Kota Padang” yang merupakan buku terjemahan karya Freek Colombijn, seorang warga negara kebangsaan Belanda. Buku ini membahas tentang sejarah Kota Padang abad ke-20 dari tahun 1906-1990. Pada bagian pertama buku ini menjelaskan tentang sejarah Kota Padang yang terbagi dalam tiga zaman yaitu zaman kolonial 1906-1942, zaman kekacauan 1942-1971 dan era pembangunan 1971-1990, sedangkan pada bagian kedua fokus pembahasan pada penggunaan ruang di Kota Padang.¹²

Buku yang ditulis oleh Suhaili Syamwil yang berjudul “Padang Kota Tercinta”. Buku ini membahas tentang Kota Padang tahun 80an sebagai sebuah

¹⁰Ed Zoelverdi, dkk, *Siapa Mengapa Sejumlah Orang Minang*, (Jakarta : BK3AM. 1995)

¹¹ Hasril Chaniago, dan Eko Yanche Edrie (eds). *Hasan Basri Durin, Sebuah Otobiografi*. (Padang :Yayasan Citra Budaya Indonesia. 2010)

¹² Freek, Colombijn, *Paco-paco Kota Padang*. (Yogyakarta : Ombak,2006)

kota yang memiliki objek alam yang indah, keadaan kota yang semakin berkembang di bidang pembangunan, perdagangan, perhubungan dan pariwisata, dan kota padang sebagai kota bersih, kota perjuangan dan kota pendidikan.¹³

Buku karangan Sartono Kartodirdjo yang berjudul “Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial”. Buku ini menjelaskan konsep kepemimpinan dalam berbagai konteks sosial dan politik hingga kedudukan serta peranannya dalam masyarakat tradisional maupun modern.¹⁴

Buku yang disusun oleh Mardanas Safwan, Gusti Asnan, dkk. yang berjudul “Sejarah Kota Padang”. Buku ini berisi lintasan sejarah Kota Padang hingga tahun 1980 yang kupas dari berbagai bidang seperti administratif, pemerintahan dan sosial ekonomi penduduk Kota Padang.

E. Kerangka Analisis

Penelitian ini memfokuskan perhatian terhadap karakter seorang tokoh pemimpin di Minangkabau. Penelitian ini dapat dikaitkan dengan studi sejarah biografi. Biografi merupakan kisah nyata dari kehidupan seseorang yang diuraikan secara tertulis oleh orang lain. Penulisan biografi bertujuan untuk menggambarkan watak atau pribadi dan pengalaman seseorang. Penulisan biografi dibedakan dalam tiga kelompok yaitu berdasarkan susunan dan waktu (kronologis) dan berdasarkan pemilihan topik tertentu (tematis) dan didasarkan pada kombinasi keduanya.¹⁵ Dalam penulisan biografi Kepemimpinan Walikota

¹³ Suhaili Syamwil, *Padang Kota Tercinta*, (Padang : Angkasa Raya, 1986)

¹⁴ Sartono Kartodirdjo, *Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial*, (Yogyakarta : LP3ES, 1984)

¹⁵ Abdurrachman Surjomiharjo, *Menulis Riwayat Hidup*, dalam *Pemikiran dan Kesenjaraan: Suatu Kumpulan Prasarana pada Berbagai Lokakarya*, (Jakarta : Depdikbud, 1983), hlm.71.

Syahrul Ujud di Kota Padang Tahun 1983-1993 didasarkan pada pemilihan topik (tematis).

Biografi yang baik menurut Taufik Abdullah adalah biografi yang mampu dan sanggup menggugah kesadaran para pembacanya.¹⁶ Memahami dan mendalami kepribadian dituntut pengetahuan latar belakang lingkungan sosio-kultural dimana tokoh itu dibesarkan, bagaimana proses pendidikan formal dan informal yang dialami, watak-watak orang yang ada disekitarnya.¹⁷ Dengan memahami latar belakang kehidupan tokoh tentunya akan dapat mengetahui segala hal yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter tokoh tersebut. Setiap biografi seharusnya mengandung empat hal yaitu kepribadian tokohnya, kekuatan sosial yang mendukung, lukisan sejarah zamannya dan keberuntungan dan kesempatan yang datang.¹⁸

Penelitian ini juga berhubungan dengan pola dan gaya kepemimpinan kepala daerah. Menurut Soerjono Soekanto, kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan seseorang (pemimpin atau *leader*) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya) sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut.¹⁹ Setiap pemimpin memiliki visi dan misi tersendiri sesuai dengan sudut pandang yang menurutnya dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Max Weber, jenis kekuasaan dibedakan menjadi tiga yaitu *Pertama*,

¹⁶ Taufik Abdullah, *Mengapa Biografi*, dalam *Prisma* No. 8 Agustus 1977, hlm. 117.

¹⁷ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm., 77.

¹⁸ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm., 206.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990), hlm.318.

kekuasaan tradisional yaitu kepemimpinan berdasarkan atas suatu kepercayaan yang telah ada pada kesucian tradisi zaman. *Kedua*, kekuasaan rasional (legal) yaitu kepemimpinan berdasarkan kepercayaan terhadap legalitas peraturan - peraturan dan hak pemegang kedudukan. *Ketiga*, kekuasaan kharismatik atau pribadi yaitu kepemimpinan berdasarkan kemampuan khusus dari pengabdian diri terhadap kesucian, kepahlawanan atau sifat tertentu seseorang.²⁰ Berdasarkan konsep tersebut, Syahrul Ujjud masuk kedalam kategori kepemimpinan tradisional. Artinya Syahrul Ujjud menerapkan gaya kepemimpinan yang telah menjadi tradisi dan kepercayaan masyarakat Kota Padang yaitu berdasarkan filosofi kepemimpinan dalam kebudayaan Minangkabau.

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya “Pemimpin dan Kepemimpinan”, ada delapan tipe kepemimpinan antara lain tipe karismatis, tipe paternalistis dan maternalistis, tipe militeristis, tipe otokratis, tipe *laisser faire*, tipe populistis, tipe administratif, dan tipe demokratis.²¹ Seorang pemimpin memiliki karakter dan kepribadian masing-masing sehingga tingkah laku dan gaya kepemimpinannya membedakan dirinya dengan orang lain. Gaya kepemimpinan dapat diartikan sebagai cara seorang pemimpin membawa diri sebagai pemimpin dalam menggunakan kekuasaannya. Dari konsep tersebut, Syahrul Ujjud masuk kedalam tipe kepemimpinan populistis. Kepemimpinan populistis adalah gaya kepemimpinan seorang pemimpin yang dapat membangun solidaritas rakyat dengan berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional dan

²⁰ Sartono Kartodirdjo, *Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial*, (Yogyakarta : LP3ES, 1984), hlm. 166.

²¹ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan : Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1992), hlm. 80.

berorientasi pada kepentingan masyarakat.²² Gaya kepemimpinan populistis mampu menggalang perlembagaan serta sarana-sarana yang dapat mendorong partisipasi masyarakat, pengembangan potensi dan kemampuan rakyat sehingga dapat mendorong tercapainya daerah yang makmur, adil dan sejahtera bagi setiap masyarakat.

Dalam masyarakat Minangkabau seorang pemimpin haruslah memenuhi kriteria tertentu menurut kebudayaan Minangkabau. Pola dan gaya kepemimpinan dalam budaya kepemimpinan di Minangkabau bercermin pada kepemimpinan *tungku tigo sajarangan* dan *tali tigo sapilin*. Sebutan tersebut merupakan sebuah ungkapan atau perumpamaan yang berasal dari nenek moyang orang Minangkabau. Tigo Tungku Sajarangan adalah lambang dari tiga unsur kepemimpinan yang terdiri dari niniak mamak, alim ulama dan cadiak pandai sedangkan tali tigo sapilin mengacu pada tiga landasan tempat berpijaknya unsur kepemimpinan tersebut.²³ Ketiga landasan tersebut diantaranya hukum adat yang menjadi pegangan niniak mamak, hukum Agama Islam atau syarak yang menjadi pegangan alim ulama dan ilmu pengetahuan yang menjadi pagangan cadiak pandai. Seorang pemimpin di Minangkabau hanya *didahulukan selangkah ditinggikan seranting*. Orang Minang menganggap dirinya duduk sama rendah tegak sama tinggi dengan orang lain, sedangkan kelebihan seorang pemimpin hanyalah karena ia ditinggikan seranting didahulukan selangkah.

²² *Ibid.* hlm 85.

²³ LKAAM Sumatera Barat, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, (Padang : Sako Batuah, 2002), hlm. 89.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode sejarah yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis data peninggalan masa lalu. Dalam Metode Sejarah terdapat empat tahapan yaitu Heuristik (metode pengumpulan sumber data dan bahan), Kritik (pengujian data dan bahan yang telah dikumpulkan), Interpretasi (penafsiran) dan Historiografi (penulisan).²⁴

Pertama, tahapan heuristik yaitu tahap pengumpulan sumber baik sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa arsip-arsip pribadi didapatkan dari Syahrul Ujud dan keluarga seperti daftar riwayat hidup, ijazah sekolah menengah pertama, ijazah Sekolah Hakim Djaksa Medan, SK Djaksa Agung RI, SK Pengangkatan Walikota Padang dan piagam-piagam penghargaan. Dokumen terbitan pemerintah didapatkan di Kantor Kearsipan Kota Padang dan Kantor Badan Pusat Statistik Kota Padang. Sedangkan untuk sumber lisan berupa wawancara dengan Syahrul Ujud dan keluarga, wartawan-wartawan senior di Kota Padang, mantan anggota DPRD Kota Padang dan masyarakat.

Sumber sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data baik dari buku, skripsi, surat kabar, maupun dari artikel atau jurnal. Sumber buku dan skripsi didapatkan di Perpustakaan Jurusan Sejarah, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, dan Perpustakaan Kota Padang. Sumber surat kabar didapatkan di Kantor Kearsipan Kota Padang dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.

²⁴ Louis Gottschlk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1995), hlm. 32.

Kedua, kritik yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber itu. Dalam metode sejarah terdapat dua cara melakukan kritik yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah.²⁵ Fungsi dari kritik eksternal memeriksa sumber sejarah terhadap keotentikan dan integritasnya data tersebut. Sedangkan kritik internal lebih menekankan aspek isi atau kesaksian dan data yang telah dikumpulkan sejarawan.

Ketiga, interpretasi atau penafsiran. Penafsiran ini merupakan salah satu dari tiga bentuk teknis dasar dalam penulisan sejarah yaitu deskripsi, narasi dan analisis. Sejarawan yang berorientasi pada sumber sejarah saja akan menggunakan porsi deskripsi narasi yang lebih banyak sedangkan sejarawan yang berorientasi kepada problema selain menggunakan deskripsi dan narasi akan lebih mengutamakan analisis.²⁶

Keempat, historiografi atau penulisan sejarah secara menyeluruh. Dalam penulisan sejarah wujud dari historiografi itu merupakan paparan, penyajian, presentasi atau penampilan yang sampai kepada atau dibaca oleh para pembaca dan pemerhati sejarah. Terdapat tiga cara pemeparan atau penyajian sejarah yaitu deskriptif-naratif, sejarah analitis-kritis dan gabungan deskriptif-naratif dan analitis-kritis. Menulis sejarah tidak hanya membutuhkan keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan tetapi juga dibutuhkan kemampuan menganalisis data untuk menghasilkan data yang otentik dari seluruh hasil penelitian.

²⁵ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta : Ombak, 2012), hlm. 104.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 123.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang berjudul Kepemimpinan Walikota Syahrul Ujud di Kota Padang Tahun 1983-1993 ini mencakup lima bab. Setiap bab akan dibahas hal-hal sebagai berikut :

Bab I bagian pendahuluan memaparkan latar belakang masalah dari tema penelitian, batasan dan perumusan masalah, tujuan melakukan penelitian, tinjauan pustaka yang memaparkan tentang studi relevan dan kerangka analitis berdasarkan tema penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas latar belakang kehidupan serta lingkungan sosial budaya Syahrul Ujud yang telah membentuk karakternya yang khas suka menyapa, riwayat pendidikan, pengalaman karir sebagai jaksa, dan berkeluarga, hingga masuknya Syahrul Ujud ke ranah perpolitikan dan diangkat menjadi Walikota Padang. Selain itu juga akan dipaparkan mengenai tokoh-tokoh yang berperan dibalik kesuksesan hidupnya.

Bab III memaparkan gambaran umum Kota Padang tahun 1983 yang merupakan periode awal kepemimpinan Syahrul Ujud sebagai Walikota Padang. Kemudian bab ini juga membahas kebijakan Syahrul Ujud dalam membangun Kota Padang yang meliputi kebijakan dalam birokrasi, perencanaan tata ruang kota, pembangunan sarana dan prasarana serta program K3.

Bab IV memaparkan tentang pola dan gaya kepemimpinan Syahrul Ujud, pengaruh metode kepemimpinannya dan pandangan masyarakat terhadap pendekatan kepemimpinan Syahrul Ujud dalam memimpin Kota Padang.

Bab V Kesimpulan berisikan tentang temuan dari penelitian ini yang merangkum seluruh pembahasan-pembahasan dalam penulisan.

